



## INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2013

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Surabaya Tahun 2013 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2013 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

### **A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA**

#### **A.1. Kondisi Geografis Daerah**

Kota Surabaya berada di  $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 57'$  Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut dan sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi ber bukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Secara administratif wilayah Kota Surabaya dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
3. Sebelah Timur : Selat Madura
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3.200.454 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 248.289 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulak yaitu 43.130 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.602.875 jiwa penduduk laki-laki (50.08%) dan 1.597.579 jiwa penduduk perempuan (49.92%).



## A.2. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2013 perekonomian Kota Surabaya terus mengalami kemajuan. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya nilai PDRB Kota Surabaya tahun 2013 yang dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu mencapai Rp 302.756.079,72 juta yang mengalami peningkatan sebesar 14,53% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 264.335.620.09 juta. Jika dilihat dari komponennya, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Surabaya pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 135.688.792,84 juta kemudian diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar Rp 63.849.201,18 juta dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp30.990.989,46 juta.

Sementara itu, total PDRB Kota Surabaya pada tahun 2013 berdasarkan perhitungan harga konstan mencapai Rp 109.075.460,72 juta juga mengalami peningkatan dibandingkan total PDRB pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 101.671.091,12 juta. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai nilai di atas 7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai perkembangan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2013 juga dapat dilihat dari distribusi prosentase masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk prosentase menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing sektor dalam kemampuan menciptakan nilai tambah pada pendapatan daerah Surabaya.

Rata-rata subsektor ekonomi memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, yaitu di atas 5%. Sektor yang tertinggi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan nilai sebesar 8,49%. Selain itu terdapat tiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan agregat Kota Surabaya. Sektor tersebut, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,49%, disusul sektor Kontruksi sebesar 8,33% dan yang terakhir adalah sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 8,31%. Namun dari sembilan sektor ekonomi terdapat satu sektor yang memiliki pertumbuhan kurang dari 1%, yaitu sektor Pertanian.



Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan petanda baik karena dapat meningkatkan perekonomian riil Kota Surabaya. Selain itu, tingginya peran dari sektor Kontruksi dalam menyediakan infrastruktur juga turut andil dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya untuk berkembang lebih maju sehingga arus perekonomian di Kota Surabaya dapat berjalan dengan lancar.

## **B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan, dengan memandang Kota Surabaya secara historis merupakan Kota pelabuhan dan sekaligus juga merupakan pusat perdagangan terutama untuk Indonesia Bagian Timur, maka pemerintah Kota Surabaya menetapkan suatu Visi :

**Menuju Surabaya Lebih Baik sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan,**

Menuju Surabaya lebih baik merupakan kata yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung Kota secara berkelanjutan, karakteristik penduduk yang terus mengalami dinamika, derajat sumber daya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan Kota, pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi serta peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 misi yang harus ditempuh sebagai berikut :

- 1. Membangun kehidupan Kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.**



**Misi ini bertujuan untuk:**

- a. Meningkatkan kualitas hidup warga Kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan;
  - b. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;
  - c. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan Kota yang lebih mandiri dan berbudaya;
  - d. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga Kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan Kota yang sehat, bersih dan hijau.
2. **Menghadirkan suasana Kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya Kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.**

Misi ini bertujuan untuk:

- a. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana Kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;
- b. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing Kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;
- c. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga Kota sebagai tujuan utama;
- d. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga Kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah.



3. **Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional,**

Misi ini bertujuan untuk :

- a. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga Kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi Kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah Kota;
- c. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga Kota;
- d. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

4. **Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

Misi ini bertujuan untuk :

- a. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga Kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;
- b. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup Kota demi terciptanya Kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga Kota;



- c. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga Kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal;
- d. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga Kota.

## **C. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI**

### **A.1. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **1. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD**

APM PAUD diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia di bawah 6 tahun di jenjang PAUD dengan jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia di bawah 6 tahun sebanyak 140.165 jiwa, sedangkan jumlah siswa dengan usia di bawah 6 tahun pada jenjang pendidikan PAUD sebanyak 133.507 orang. Dengan demikian, APM PAUD pada tahun 2013 mencapai 95,25%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

#### **2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

APK PAUD diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD dengan jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia dibawah 6 tahun sebanyak 140.165 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan PAUD sebanyak 134.222 orang. Dengan demikian, APK PAUD pada tahun 2013 mencapai 95,76%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,80% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

### **A.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

#### **1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI**

Angka kelulusan SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa SD/MI yang lulus dengan jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6.



Jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6 dihitung berdasarkan data siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Dari data angka kelulusan SD/MI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa seluruh siswa jenjang SD/MI sebanyak 46.269 orang lulus ujian tingkat akhir, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka kelulusan SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa SMP/MTs yang lulus dengan jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 9. Jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 9 dihitung berdasarkan data siswa kelas 9 SMP/MTs yang mengikuti ujian. Dari data angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.838 orang atau 99,89% dari jumlah siswa kelas 9 SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 38.882 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.00%.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 298.297 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 284.396 orang. Dengan demikian, APM SD/MI pada tahun 2013 mencapai 95,34%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,36% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

APM SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 147.426 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 136.929 orang. Dengan demikian, APM SMP/MTs pada tahun 2013 mencapai 92,88%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,50%.



5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

APK SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 298.297 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 313.897 orang. Dengan demikian, APK SD/MI pada tahun 2013 mencapai 105,23%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,03% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105,20%.

6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 147.426 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 155.018 orang. Dengan demikian, APK SMP/MTs pada tahun 2013 mencapai 105,15%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105%.

7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Dari data APS SD/MI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa tidak terdapat siswa yang putus sekolah pada jenjang SD/MI atau 0,00% dari jumlah siswa pada jenjang SD/MI sebanyak 313.897 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0% maka capaiannya adalah 100%. Hal ini meningkat dari APS tahun 2012 sebesar 0,003% (8 orang), sedangkan tahun 2011 APS SD/MI adalah sebesar 0%.

8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Dari data APS SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4 orang atau 0,003% dari jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs sebanyak 155.018 orang. Masih adanya siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs tersebut dikarenakan seluruh siswa tersebut harus bekerja membantu orang tua.

9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

Pada tahun 2013, jumlah siswa pada jenjang SD/MI yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 46.269 orang, sedangkan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs sebanyak 46.023 orang atau mencapai 99,47%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 99%, maka capaian kinerjanya mencapai 100,47%.





### A.3. Program Pendidikan Menengah

Pencapaian Program Pendidikan Menengah diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu:

1. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA

Dari data angka kelulusan SMA/MA pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMA/MA yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 18.042 orang atau 99,94% dari jumlah siswa kelas 3 SMA/MA yang mengikuti ujian sebanyak 18.052 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99%.

2. Angka Kelulusan (AL) SMK

Dari data angka kelulusan SMK pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 19.209 orang atau 99,99% dari jumlah siswa kelas 12 SMK yang mengikuti ujian sebanyak 19.211 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,01%.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 144.973 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 130.649 orang. Dengan demikian, APM SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 90,12%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 144.973 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 152.555 orang. Dengan demikian, APK SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 105,23%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105%.

5. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

Dari data APS SMA/MA pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa yang putus sekolah pada jenjang SMA/MA sebanyak 6 orang atau 0,009% dari jumlah siswa pada jenjang SMA/MA sebanyak 65.599 orang. Masih adanya



siswa putus sekolah pada jenjang SMA/MA tersebut antara lain dikarenakan bekerja membantu orang tua dan menikah. Capaian tersebut meningkat dari APS pada tahun 2012 sebanyak 2 orang namun lebih rendah daripada tahun 2011 sebanyak 34 orang.

6. Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Dari data APS SMK pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa yang putus sekolah pada jenjang SMK sebanyak 9 orang atau 0,010% dari jumlah siswa pada jenjang SMK sebanyak 86.956 orang. Masih adanya siswa putus sekolah pada jenjang SMK tersebut antara lain dikarenakan bekerja membantu orang tua dan menikah.

7. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK

Pada tahun 2013, jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.838 orang, sedangkan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 38.511 orang atau mencapai 99,16%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 92,50%, maka capaian kinerjanya mencapai 107,20%.

8. Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha

Pada tahun 2013, jumlah siswa kejuruan yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 19.209 orang, sedangkan jumlah siswa kejuruan yang diterima bekerja/wirausaha sebanyak 12.205 orang atau mencapai 63,54%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 60%, maka capaian kinerjanya mencapai 105,90%.

#### A.4. Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan non formal yang dimaksud dalam hal ini adalah program pendidikan luar sekolah yang dilakukan untuk menekan jumlah penduduk yang buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf. Angka melek huruf dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun keatas tercatat sebanyak 2.496.805 jiwa dan seluruhnya telah dapat membaca dan menulis. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.



#### **A.5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dari pendidik maupun tenaga kependidikan agar dapat memenuhi standar kualifikasi. Indikator kinerja untuk mengukur capaian dari program ini adalah persentase tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi, yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dengan jumlah tenaga pendidik.

Pada tahun 2013, jumlah tenaga pendidik di Kota Surabaya sebanyak 25.781 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.094 orang atau 93,46% telah memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 92,08%, maka capaian kerjanya adalah 101,49%.

### **B. URUSAN WAJIB KESEHATAN**

Urusan Wajib Kesehatan diimplementasikan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **B.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Pencapaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

##### **1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**

Pada tahun 2013, persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar/rujukan masyarakat miskin telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dimana seluruh warga miskin di Surabaya yang telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Surat Keterangan Miskin sebanyak 406.654 orang yang berobat di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya telah dipenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya. Adapun secara rinci, pemanfaatan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada puskesmas dan rumah sakit



swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dengan cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di sarana pelayanan kesehatan sebesar 606.238 kunjungan. Sementara pada RSUD dr. M. Soewandhie tercatat sejumlah 73.317 orang dan RSUD Bhakti Dharma Husada sebanyak 19.830 orang.

## 2. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB dalam periode/kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2013 dari 160 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, terdapat 60 Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dengan 87 kasus KLB. Kelurahan yang mengalami KLB antara lain :

- |                           |                            |                        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Kel Tanjungsari;       | 21. Kel Krembangan Selatan | 41. Kel Semolowaru     |
| 2. Kel Putat Gede;        | 22. Kel Morokrembangan     | 42. Kel Klampis Ngasem |
| 3. Kel Simomulyo;         | 23. Kel Kenjeran           | 43. Kel Gebang Putih   |
| 4. Kel Manukan Kulon;     | 24. Kel Bulak              | 44. Kel Keputih        |
| 5. Kel Karangpoh;         | 25. Kel Tanah Kedinding    | 45. Kel Sutorejo       |
| 6. Kel Balongsari;        | 26. Kel Rangkah            | 46. Kel Kalisari       |
| 7. Kel Asem Rowo;         | 27. Kel Pacar Keling       | 47. Kel Kalijudan      |
| 8. Kel Sememi;            | 28. Kel Gading             | 48. Kel Putat Jaya     |
| 9. Kel Pakal;             | 29. Kel Dukuh Setro        | 49. Kel Pakis          |
| 10. Kel Lakarsantri;      | 30. Kel Pucangsewu         | 50. Kel Banyu Urip     |
| 11. Kel Lidah Kulon;      | 31. Kel Kertajaya          | 51. Kel Jagir          |
| 12. Kel Lontar;           | 32. Kel Mojo               | 52. Kel Sawunggaling   |
| 13. Kel Peneleh;          | 33. Kel Kalirungkut        | 53. Kel Wonokromo      |
| 14. Kel Ketabang;         | 34. Kel Kedungbaruk        | 54. Kel Ngagelrejo     |
| 15. Kel Wonorejo;         | 35. Kel Medokan Ayu        | 55. Kel Dukuh Kupang   |
| 16. Kel Tambakrejo;       | 36. Kel Penjaringsari      | 56. Kel Gunungsari     |
| 17. Kel Simokerto;        | 37. Kel Wonorejo           | 57. Kel Wiyung         |
| 18. Kel Simolawang;       | 38. Kel Kendangsari        | 58. Kel Gayungan       |
| 19. Kel Krembangan Utara; | 39. Kel Kutasari           | 59. Kel Pagesangan     |
| 20. Kel Wonokusumo;       | 40. Kel Rungkut Menanggal  | 60. Kel Jambangan      |



Dari kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) tersebut, 100% telah ditangani < 24 jam sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

## **B.2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**

Pencapaian Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:

### **1. Jumlah Puskesmas Induk yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Inap**

Pada tahun 2013, jumlah puskesmas induk yang ada di Kota Surabaya berjumlah 62 puskesmas. Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap di Kota Surabaya tahun 2013 sejumlah 19 puskesmas dengan target 17 puskesmas di tahun 2013. Capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas induk meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebesar 111,76%.

### **2. Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Induk**

Selain sarana kesehatan berupa Puskesmas, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berfungsi sebagai penunjang pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada tahun 2013, jumlah Puskesmas pembantu yang ada di Kota Surabaya berjumlah 60 puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk di kota Surabaya tahun 2013 sebanyak 9 puskesmas. Apabila dibandingkan dengan target 6 puskesmas pada tahun 2013, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas pembantu meningkat menjadi puskesmas induk sebesar 150%. Adapun Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Induk dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 3.23.



### **B.3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**

Pencapaian keberhasilan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:

#### **1. Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhie**

Capaian indikator yang pertama untuk mendukung capaian program tersebut diatas adalah pencapaian klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie menjadi rumah sakit kelas B.

Pada tahun 2013, klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie menjadi rumah sakit kelas B Untuk mencapai peningkatan klasifikasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya-upaya Penambahan tempat tidur menjadi 291 buah, penambahan pelayanan bedah toraks kardio vascular, pelayanan bedah urologi, bedah plastik, bedah mulut & maksosfasial, penyediaan peralatan kamar jenazah dan peralatan pelayanan darah.

#### **2. Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada**

Capaian indikator yang kedua adalah peningkatan klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada. Pada tahun 2013 klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada menjadi rumah sakit kelas C Untuk mencapai peningkatan klasifikasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya-upaya pemenuhan tenaga dengan penambahan SDM khususnya dokter spesialis di 4 pelayanan spesialis dasar masing-masing minimal 3 orang dan spesialis penunjang masing-masing minimal 2 orang, penambahan jumlah tempat tidur sampai dengan 200 tempat tidur, serta penambahan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di rumah sakit.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya guna mendukung pencapaian indikator Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata antara lain adalah:



#### B.4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pencapaian keberhasilan Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak diukur melalui 9 (sembilan) indicator, yaitu:

1. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pada tahun 2013, ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 44.463 orang dari prediksi 46.303 ibu bersalin, sehingga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96.03% Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96%, maka capaian kinerjanya adalah 100.03%.

2. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG

Pada tahun 2013, jumlah bayi yang berumur 0 – 11 bulan sejumlah 43.280 jiwa. Dari jumlah tersebut sejumlah 41.526 jiwa telah mendapatkan imunisasi BCG sehingga cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi BCG sebesar 95.95% Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 106.61%.

3. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1

Pada tahun 2013, jumlah bayi yang berumur 0 – 11 bulan sejumlah 43.280 jiwa. Dari jumlah tersebut sejumlah 41.003 jiwa telah mendapatkan imunisasi DPT1 + HB1 sehingga cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT1 + HB1 sebesar 94.74% Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 105.27% .

4. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3

Pada tahun 2013, jumlah bayi yang berumur 0 – 11 bulan sejumlah 43.280 jiwa. Dari jumlah tersebut sejumlah 39.489 jiwa telah mendapatkan imunisasi DPT3 + HB3 sehingga cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT3 + HB3 sebesar 91.24% Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 101.38%.



5. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4

Pada tahun 2013, jumlah bayi yang berumur 0 – 11 bulan sejumlah 43.280 jiwa. Dari jumlah tersebut sejumlah 38.766 jiwa telah mendapatkan imunisasi Polio 4 sehingga cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi Polio 4 sebesar 89.57%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kerjanya adalah 99.52%.

6. Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak

Indikator cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi Campak diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi Campak dengan total bayi 0 – 11 bulan. Pada tahun 2013, jumlah bayi yang berumur 0 – 11 bulan sejumlah 43.280 jiwa. Dari jumlah tersebut sejumlah 39.580 jiwa telah mendapatkan imunisasi Campak sehingga cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi Campak sebesar 91,45%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kerjanya adalah 101,61%.

7. Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Pada tahun 2013 di kota Surabaya terdapat 444 balita gizi buruk yang tercatat. Dari 444 balita gizi buruk tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan dan intervensi dari pemerintah kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaiannya adalah 100%.

8. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Selama tahun 2013 tercatat jumlah kunjungan ibu hamil K4 adalah 47.592 ibu hamil dari 48.507 prediksi ibu hamil, sehingga cakupan kunjungan ibu hamil K4 di sarana pelayanan kesehatan sebesar 98.11%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 98%, maka capaian kerjanya adalah 100,11%.

9. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dengan sasaran bayi. Jumlah kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan yang tercatat selama tahun 2013 adalah 40.953 bayi dari prediksi 43.280 bayi, sehingga cakupan kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan sebesar





94.62%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 105,13%.

### **C. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM**

Urusan Wajib Pekerjaan Umum diimplementasikan melalui 3 (tiga) program, yaitu: Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pengendalian Banjir serta Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **C.1. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator lama jam sibuk selama 6 jam 37 menit. Sampai dengan tahun 2013 Surabaya telah memiliki jalan kota sepanjang 1.677,98 kilometer dimana 1.647,55 kilometer diantaranya dalam kondisi baik, 16,64 kilometer dalam kondisi rusak sedang, 12,49 kilometer dalam kondisi rusak dan 1,30 kilometer dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata jam sibuk di kota Surabaya selama tahun 2013 adalah 6 jam 30 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6 jam 37 menit, maka capaian kinerjanya adalah 101,76%.

#### **C.2. Program Pengendalian Banjir**

Pencapaian keberhasilan Program Pengendalian Banjir diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

##### **1) Luas Wilayah Genangan**

Luas area genangan antara lain tergantung pada tingkat curah hujan, kapasitas saluran drainase dan kemampuan pompa banjir yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya. Luas area genangan di kota Surabaya pada tahun 2013 seluas 1.371,712 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2.199 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 137,62%.

##### **2) Rata-rata Lama Terjadinya Genangan**

Lama terjadinya genangan air diukur berdasarkan rata-rata waktu yang dibutuhkan genangan air untuk surut. Rata-rata lama terjadinya genangan di kota Surabaya pada tahun 2013 mencapai 57,636 menit atau 0,96 jam, sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,94% dari target yang telah ditetapkan selama 60 menit atau 1 jam.



Beberapa kawasan di Kota Surabaya yang memiliki waktu genangan air yang cukup lama untuk surut dengan waktu lebih dari 1 jam antara lain : Bangkingan, Gendong (bawah tol akses Romokalisari ke Benowo), Sumberejo, Sumber Langgeng, Ketintang Permai, Ketintang Madya, Karang Rejo dan Jetis Baru, dsb.

3) Rata-rata Tinggi Genangan Yang Terjadi

Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan program pengendalian banjir adalah rata-rata tinggi genangan yang terjadi. Pada tahun 2013, rata-rata tinggi genangan yang terjadi di wilayah kota Surabaya adalah 17,707 cm, sehingga capaian kinerjanya mencapai 111,465% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 cm.

Beberapa kawasan di Kota Surabaya yang memiliki tinggi genangan air yang lebih dari 20cm antara lain : Gendong (bawah tol Romokalisari akses ke Benowo), Sumberejo, Kupang Baru, Darmo Baru, Ketintang Baru, Karangrejo, Jetis Baru, dst

C.3. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Pencapaian keberhasilan Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Cakupan Layanan Air Bersih

Pada tahun 2013 nilai cakupan layanan air bersih di Surabaya adalah sebesar 90,02%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,28%, maka capaian kinerjanya adalah 105,56%.

2. Kebocoran Air Bersih

Persentase kebocoran air bersih yang rendah menunjukkan meningkatnya kendali mutu terhadap penyaluran air bersih kepada masyarakat. Menurut data yang dihimpun dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2013 persentase kebocoran air bersih di kota Surabaya adalah sebesar 28,96%, sehingga capaian kinerjanya adalah 110,76% dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 32,45%.

D. URUSAN WAJIB PERUMAHAN

Urusan Wajib Perumahan diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yaitu Program Perumahan dan Permukiman, Program Utilitas Perkotaan serta



Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **D.1. Program Perumahan dan Permukiman**

Pencapaian kinerja pada program perumahan dan permukiman diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah MBR Yang Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni

Pada Tahun 2013, MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni adalah sebesar 3.111 KK atau meningkat sebanyak 126 KK dari 2.985 KK pada tahun 2012, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,24% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.073 KK.

2. Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman

Pada tahun 2013 penambahan luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah seluas 79,59 Ha sehingga secara keseluruhan capaian peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah seluas 405,11 Ha dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 412 Ha. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 98,33%.

3. Rasio Kebutuhan Makam Selama Lima Tahun ke Depan Terhadap Angka Ketersediaan Makam

Pada tahun 2013, lahan makam yang tersedia adalah sebesar 23,43 Ha, sedangkan kebutuhan lahan makam pada tahun 2013 adalah sebesar 4,28 Ha, sehingga rasio kebutuhan lahan makamnya adalah sebesar 0,18 dari target rasio yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,33. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 144,47%.

#### **D.2. Program Utilitas Perkotaan**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya cakupan layanan penerangan jalan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah rasio panjang jalan yang sudah mendapat penerangan terhadap seluruh panjang jalan di Kota Surabaya. Pada tahun 2013 ditetapkan target sebesar 79,95%. Capaian di tahun 2013 yaitu



panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan jalan adalah 2.059,770 kilometer dimana panjang jalan kota Surabaya termasuk jalan lingkungan adalah 2.379,53 kilometer atau 86,56% sudah mendapat penerangan jalan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79,95% maka capaian kinerjanya adalah 108,27%.

#### D.3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pencapaian kinerja program pencegahan dan penanggulangan kebakaran diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

##### 1. Frekuensi Kejadian Kebakaran Per Satu Juta Penduduk

Indikator ini menunjukkan besarnya jumlah kejadian kebakaran di Surabaya dibandingkan dengan setiap satu juta penduduk. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Surabaya adalah 3.200.454 jiwa, sedangkan jumlah kejadian kebakaran yang terjadi adalah 397 kejadian, sehingga frekuensi kejadian kebakaran per satu juta penduduk adalah 124 kejadian. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 102 kejadian, maka capaian kinerjanya adalah 78,43%. Tidak tercapainya target ini antara lain dikarenakan meningkatnya permukiman padat.

##### 2. Pencapaian Waktu Tanggap Kurang Dari 15 Menit

Indikator pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit dengan jumlah kebakaran. Sepanjang tahun 2013 di Kota Surabaya tercatat telah terjadi 397 kejadian kebakaran yang telah ditangani. Dari seluruh kejadian tersebut 381 atau 96% diantaranya dapat ditangani kurang dari 15 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79%, maka capaian kinerjanya adalah 121,52%.

##### 3. Jangkauan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara luas wilayah pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan luas wilayah Kota Surabaya. Pada tahun 2013, wilayah Kota Surabaya yang telah terjangkau oleh manajemen kebakaran adalah 273,87 km<sup>2</sup> sehingga jangkauannya adalah 89,64%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 87%, maka capaian kinerjanya adalah 103,03%.



#### **E. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG**

Urusan Wajib Penataan Ruang diimplementasikan melalui Program Penataan Ruang. Pada tahun 2013, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sebesar 53,90%, indikator tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara luas wilayah Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang tersusun dengan luas wilayah Kota Surabaya. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sampai dengan tahun 2013 adalah 53,84%, sehingga capaian kinerjanya adalah 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,90%.

#### **F. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Pada tahun 2011, terdapat 1 dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu, sedangkan pada tahun 2012, seluruh dokumen perencanaan dapat disusun tepat waktu. Pada tahun 2013, dari 4 dokumen perencanaan yang disusun, seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

#### **G. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN**

Urusan Wajib Perhubungan diimplementasikan melalui Program Pengembangan Sistem Transportasi. Program Pengembangan Sistem Transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum. Pencapaian program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

##### **1. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan**

Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri primer adalah sebesar 27,84 km/jam dan ruas jalan arteri sekunder sebesar 28,53 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 23,73 km/jam untuk ruas jalan arteri primer dan 21,47 km/jam untuk ruas jalan arteri sekunder, maka capaian kinerjanya adalah 117,32% untuk ruas jalan arteri primer dan 132,88% untuk ruas jalan arteri sekunder.



## 2. Headway Angkutan Umum

Indikator headway angkutan umum untuk mikrolet dan bis kota diukur berdasarkan perbandingan antara headway rata-rata tiap trayek dengan jumlah trayek. Headway angkutan umum adalah waktu antara dua kendaraan angkutan umum dalam satu trayek untuk melewati suatu titik atau pemberhentian.

Sampai dengan tahun 2013, jumlah trayek angkutan umum di Surabaya adalah sebanyak 78 trayek yang terdiri dari 58 trayek angkutan kota dan 20 trayek bus kota. Dengan armada yang telah ada, headway angkutan umum rata-rata adalah 24,84 menit untuk mikrolet/angkutan kota dan 42,73 menit untuk bus kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit untuk mikrolet/angkutan kota dan 32,41 menit untuk bus kota, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 31,25% untuk mikrolet/angkutan kota dan 68,16% untuk bus kota. Hal tersebut dikarenakan kualitas layanan angkutan umum yang mengalami penurunan sehingga keberadaan angkutan umum tidak mempunyai daya tarik lagi bagi masyarakat untuk beralih moda yang semula menggunakan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum. Pertambahan jumlah kendaraan roda dua yang trennya cenderung meningkat karena lebih diminati dan lebih fleksibel juga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan angkutan umum.

## H. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Wajib Lingkungan Hidup diimplementasikan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Kebersihan Kota dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

### H.1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan. Pencapaian sasaran program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:



## 1. Meningkatnya Kualitas Air

Indikator meningkatnya kualitas air ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase penurunan beban pencemaran yang ditimbulkan oleh aktifitas kegiatan/usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah. Cara pengukurannya adalah dengan menjumlahkan prosentase penurunan beban tahun lalu dengan perbandingan selisih beban pencemar tahun lalu dan beban pencemar tahun ini terhadap beban pencemar tahun lalu. Beban pencemaran air limbah dari suatu kegiatan/usaha (industri, rumah sakit, domestik dan hotel) dapat diukur dari konsentrasi kadar BOD, COD dan TSS dalam air limbah.

BOD (*Biological Oxygen Demand*) adalah analisis empiris untuk mengukur proses-proses biologis (khususnya aktivitas mikroorganisme) yang berlangsung di dalam air. BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air. COD (*Chemical Oxygen Demand*) menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara biokimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis (*biodegradable*) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (*non-biodegradable*). TSS (*Total Suspended Solid*) adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik.

## 2. Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator meningkatnya kualitas udara diukur berdasarkan meningkatnya prosentase penurunan kadar polutan dari emisi sumber tidak bergerak/industri pada parameter Sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) yang merupakan kontributor utama hujan asam. Cara pengukurannya adalah dengan menjumlahkan prosentase penurunan kadar polutan tahun lalu dengan perbandingan selisih kadar polutan tahun lalu dan kadar polutan tahun ini terhadap kadar polutan tahun lalu.

Dari hasil pengujian yang dilaksanakan pada tahun 2013 terhadap 42 sampel udara emisi industri, didapat prosentase penurunan  $\text{SO}_2$  sebesar 76,11% dan  $\text{NO}_2$  sebesar 61,63% .



## H.2. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Pencapaian sasaran program pengelolaan kebersihan kota diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

### 1. Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2013, di Surabaya telah terdapat 179 TPS, sehingga capaian cakupan layanan kebersihan adalah 1,02. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 171 TPS atau 0,98, maka capaian kinerjanya adalah 104,68%.

### 2. Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA

Pada tahun 2013, jumlah sampah yang dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebanyak 1.394,22 ton/hari. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 1.204,92 ton/hari, maka capaian kinerjanya adalah 84,29%.

### 3. Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS

Pada tahun 2013, rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah sebanyak 3.681,5 m<sup>3</sup>/hari. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 3.517,4 m<sup>3</sup>/hari, maka capaian kinerjanya adalah 95,33%.

## H.3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada tahun 2013, RTH yang dioptimalkan mencapai 60,632 Ha atau 0,909% dari luas RTH 6.670,42 Ha, sehingga sampai dengan tahun 2013 akumulasi RTH yang dioptimalkan mencapai 1.884,042 Ha atau 28,25% dari luas total RTH. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 70,17%. Belum optimalnya capaian pada Tahun 2013 karena pengaruh kondisi iklim kawasan pesisir yang kurang mendukung penanaman mangrove. Adapun perkembangan RTH yang dioptimalkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 3.54.

## I. URUSAN WAJIB PERTANAHAN

Urusan Wajib Pertanahan diimplementasikan melalui Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota yang diukur melalui indikator jumlah aset pemerintah kota Surabaya yang tersertifikat.





Pada tahun 2013, jumlah aset tanah Pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat sebanyak 566 bidang atau 45,24% dari total aset tanah pemerintah kota Surabaya sebesar 1.251 bidang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 612, maka capaian kerjanya adalah 92,48%.

#### **J. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan dengan proses administrasi yang tetap tertata. Pencapaian sasaran program penataan administrasi kependudukan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

##### **1. Persentase Penduduk ber-KTP**

Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk ber-KTP dengan jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Pada tahun 2013, jumlah penduduk di kota Surabaya yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2.194.887 jiwa dari total 2.402.685 jiwa wajib KTP atau 91.35%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91%, maka capaian kerjanya adalah 100.39%.

##### **2. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran**

Pada tahun 2013, tercatat ada 30.784 kelahiran dimana 30.729 atau 99.82% diantaranya telah dicatatkan dengan akte kelahiran. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kerjanya adalah 110.91%.

#### **K. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:



K.1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini diukur dengan capaian indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak, yang diimplementasikan melalui pembinaan lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kota Surabaya terdapat 85 lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina. Pembinaan yang dilakukan kepada Organisasi Perempuan tersebut berupa *Capacity Building* Organisasi Peduli Perempuan dan Anak terutama dalam bidang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 85 lembaga, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

K.2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan adalah sebanyak 209 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 209 kasus atau 100% telah ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kasus KDRT terhadap perempuan dan anak umumnya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, *Shelter* (Rumah Aman).



**L. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Pada tahun 2013, dari 543.387 Pasangan Usia Subur terdapat 452.243 peserta KB aktif atau 83,23% diantaranya yang menjadi peserta KB aktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79,52%, maka capaian kinerjanya adalah 104,67%.

**M. URUSAN WAJIB SOSIAL**

Urusan Wajib Sosial diimplementasikan melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

**M.1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial didukung dengan capaian indikator persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, indikator tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah PMKS yang ditangani dengan seluruh jumlah PMKS.

Berdasarkan tahun dasar 2010, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surabaya sebanyak 63.707 orang. Arus urbanisasi berkontribusi dalam meningkatnya jumlah PMKS. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 67.896 orang atau 106,58% telah ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39%(24.846), maka capaian kinerjanya adalah 273,27%. Pola pembinaan dan pelatihan serta perubahan perilaku bagi semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial Kota Surabaya seperti Wanita Tuna Susila, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penyandang cacat, Orang Dengan HIV AIDS, eks napza, dan lansia. Selain itu ada kegiatan pemberian permakanan kepada lansia miskin dan terlantar, penyandang cacat miskin dan terlantar, anak yatim, piatu, dan yatim piatu, serta pelayanan di liponsos.

**M.2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial sebesar 50%. Selama tahun 2013, PSKS yang telah berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan



sosial adalah 975 PSKS atau mencapai 74,09% dari 1.316 PSKS. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sampai sebesar 50%, maka capaian kinerjanya adalah 148,18%.

## **N. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN**

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Kedua program ini diuraikan sebagai berikut:

### **N.1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Program peningkatan kesempatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi segenap pencari kerja di kota Surabaya, program ini diukur dengan indikator persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja yang berdasarkan perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja. Pada awal tahun 2013 dari 71.997 orang pencari kerja, sebanyak 3.744 orang atau 5,2% telah berhasil ditempatkan pada pasar kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 104%.

### **N.2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator persentase penyelesaian sengketa pekerja pengusaha, yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sengketa yang berhasil ditangani dengan jumlah sengketa yang dilaporkan. Pada tahun 2013 terdapat 458 kasus sengketa pekerja pengusaha, dimana 347 kasus atau 75,76% telah berhasil diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 74%, maka capaian kinerjanya adalah 102,38%.

## **O. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diimplementasikan dalam 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:



O.1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki daya saing. Yang dimaksud dengan daya saing adalah usaha skala mikro-kecil yang memiliki standar pengelolaan usaha, dimana kelompok tersebut masih aktif melakukan usaha dan memiliki aspek daya saing dari segi aset, proses dan kinerja. Sampai dengan tahun 2012 jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki daya saing telah memenuhi target sebanyak 39 kelompok. Pada tahun 2013, jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki daya saing sebanyak 49 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 49 kelompok, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

O.2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pencapaian kinerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi aktif yang mampu melaksanakan RAT. Pada tahun 2013 dari total 1.295 koperasi aktif di Surabaya, sebanyak 192 unit diantaranya adalah koperasi berkualitas. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 172 unit maka capaian kinerjanya adalah 111,63%.

2. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Koperasi Pasif yang Berhasil Direvitalisasi

Pada tahun 2013, terdapat 288 koperasi yang berstatus koperasi pasif. Dari jumlah tersebut 43 unit diantaranya telah berhasil direvitalisasi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 100 unit, maka capaian kinerjanya adalah 43%. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja dari indikator ini disebabkan karena faktor-faktor seperti : (i) perubahan alamat pengurus ataupun kantor tanpa ada konfirmasi ke Dinas Koperasi dan UMKM sehingga keberadaan koperasi yang menjadi target sasaran menjadi tidak dapat dilacak, (ii) perusahaan dimana koperasi didirikan mengalami pailit sehingga anggota dan pengurus koperasi yang bersangkutan memutuskan untuk dibubarkan.



### 3. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Baru Koperasi Yang Terbentuk

Pembentukan Koperasi baru juga diperlukan untuk pencapaian keberhasilan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Pada tahun 2013, jumlah koperasi di Surabaya adalah sebanyak 1.583 unit atau meningkat sebanyak 35 unit dari 1.548 unit pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: murni inisiasi masyarakat (sebanyak 5 unit) dan hasil intervensi secara berkelanjutan oleh Pemerintah kota (sebanyak 30 unit). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 unit, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Secara kuantitas penambahan koperasi baru pada tahun 2013 relatif lebih lambat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 61 unit, namun apabila dibandingkan dengan dua periode sebelumnya yaitu tahun 2011 dan 2012 maka penambahan koperasi baru di tahun 2013 dinilai lebih berkualitas karena diikuti dengan penambahan jumlah total anggota yang cukup signifikan (menjadi 250.124 orang). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 terjadi penambahan jumlah anggota sebanyak 9.398 orang dibandingkan dengan tahun 2011 (240.726 orang) dan 3.016 orang dibandingkan dengan tahun 2012 (247.108 orang).

## **P. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL**

Urusan Wajib Penanaman Modal diimplementasikan melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program ini dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terutama dalam pelayanan perijinan penunjang investasi.

Meningkatnya iklim investasi di Surabaya ditunjukkan dengan peningkatan kemudahan berusaha yang diukur dengan nilai interval konversi indeks kepuasan masyarakat terutama dalam pelayanan perizinan penunjang investasi, yang pada tahun 2013 sebesar 75,83%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, maka capaian kinerjanya adalah 89,21%.



**Q. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN**

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya, Pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 175 kelompok seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Dari 203 kelompok seni di Surabaya yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kesenian), 175 kelompok seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kerjanya adalah 100%.

**R. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan serta Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

**R.1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri. Pada tahun 2013, terdapat 76 pemuda/kelompok pemuda yang telah mampu mengembangkan usaha mandiri. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 70 pemuda/kelompok pemuda, maka capaian kerjanya adalah 108,57%.

**R.2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

Pencapaian Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

**1. Atlit/Organisasi Olahraga Yang Berprestasi**

Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan jumlah atlit/organisasi olahraga yang berprestasi. Pada tahun 2013, atlit/organisasi olahraga di Surabaya yang telah berhasil menorehkan prestasi sebanyak 1,435 atlit/organisasi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1.435 atlit/organisasi, maka capaian kerjanya adalah 100%.



2. Prasarana Olahraga Yang Dikembangkan

Demi mendukung keberhasilan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga diperlukan juga pengembangan prasarana olahraga yang dikembangkan. Pada tahun 2013, pemerintah kota Surabaya telah mengembangkan sebanyak 27 prasarana berupa Lapangan Olahraga di Sekolah dan di Lingkungan Masyarakat seperti Lapangan Sepak Bola, Lapangan Futsal, Lapangan Basket, Lapangan Volley dan Lapangan Bulutangkis sehingga sampai dengan tahun 2013 jumlah prasarana olahraga yang dikembangkan adalah sebanyak 188 prasarana. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 202, maka capaian kinerjanya adalah 93,07%.

3. Jenis Olahraga Rekreasi Yang Digali, Dibina Dan Dikembangkan

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan. Pada tahun 2013 pemerintah kota Surabaya telah menggali, membina dan mengembangkan sebanyak 5 jenis olahraga rekreasi, sehingga sampai dengan tahun 2013 jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan adalah sebanyak 38 jenis. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 38 jenis, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

**S. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pelanggaran K3 yang ditangani dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP. Pada tahun 2013, terdapat pelanggaran K3 sebanyak 69.098 objek, dari jumlah tersebut 69.098 telah ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%.





**T. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Penataan Daerah Otonom, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

**T.1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah bertujuan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

**1. Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD yang Ditindaklanjuti**

Pada tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya telah mengajukan usul prakarsa sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 usulan telah ditindaklanjuti dengan rapat paripurna untuk menjadi prakarsa DPRD. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6 raperda maka capaian kinerjanya adalah 66,67%.

**2. Persentase Raperda yang Ditindaklanjuti Dalam Rapat Paripurna**

Pada tahun 2013, jumlah total seluruh Raperda yang diusulkan oleh pemerintah kota untuk dibahas di DPRD Kota Surabaya adalah 18 Raperda, dari jumlah tersebut sebanyak 9 Raperda atau 50% telah ditindaklanjuti dalam rapat paripurna. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91%, maka capaian kinerjanya adalah 54,95%.



3. Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti DPRD

Pada tahun 2013 tercatat ada 332 keluhan yang masuk ke DPRD Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut sebanyak 217 keluhan atau 65,36% telah ditindaklanjuti DPRD dengan rapat hearing. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, maka capaian kinerjanya adalah 76,90%.

4. Jumlah Publik Hearing yang Dilaksanakan

Pada tahun 2013, DPRD Kota Surabaya telah mengadakan 4 kali publik hearing. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

T.2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada APBD tahun 2013 sebesar Rp 2.657.109.226.595,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.791.580.050.710,00 atau mencapai 105,06%. Angka realisasi Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 511.957.234.079,00 atau 22,46% dari tahun 2012 sebesar Rp 2.279.622.816.631,00. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 13,49% sedangkan realisasinya sebesar 22,46%, maka capaian kinerjanya adalah 166,48%.

Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 mencapai Rp2.154.652.323.797,00 atau mencapai 101,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.118.292.666.000,00. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,18%.



b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah di Kota Surabaya dipungut dari 24 jenis retribusi, dengan rincian 11 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha dan 3 retribusi perijinan tertentu Pada tahun 2013, realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp232.234.211.718,00 atau mencapai 98,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp235.196.801.853,00. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,32%.

2. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya

Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp600.991.778.463,00 atau 12,97% dari tahun 2012 sebesar Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka capaian kinerjanya adalah 36,15%. Tidak tercapainya target penerimaan daerah lainnya dikarenakan:

1. Realisasi bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, pasal 29, dan pasal 21 tercapai Rp200.156.562.314,00 atau 76,67%
2. Realisasi pertambangan panas bumi tercapai Rp6.768.550,00 atau 40%
3. Realisasi Dana Alokasi Khusus tercapai Rp29.928.308.000,00 atau 43,90%
4. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp613.629.385.380,00 atau 92,39%

Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 mencapai Rp1.460.891.497.629,00 atau mencapai 93,23% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.567.049.863.846,00. Kontribusi penerimaan dana perimbangan terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 59,78%.



b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 mencapai Rp 982.822.168.576,00 atau 95,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.031.085.063.003,00. Kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 40,22%.

T.3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pada tahun 2013, jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah sebanyak 12 kasus. Hal ini menunjukkan menurunnya jumlah pelanggaran disiplin aparatur yang sangat signifikan Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 209 kasus, sehingga capaian kinerjanya adalah 194,26%.

T.4. Program Penataan Daerah Otonom

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Surabaya telah memasang 260 patok batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan, sehingga sampai dengan tahun 2013 jumlah patok batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang telah terpasang adalah sebanyak 1.394 patok atau 37%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 37%, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

T.5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Pada tahun 2013, jumlah MOU kerjasama antar pemerintah daerah yang berlaku adalah 18 MOU, dari sejumlah MOU tersebut, 16 MOU atau 88.89% diantaranya telah ditindaklanjuti dengan program kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 88,88%, maka capaian kinerjanya adalah 100.01%.

T.6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahun 2013, rancangan produk hukum yang diajukan sebanyak 90 rancangan produk hukum, dari jumlah tersebut seluruhnya telah dapat diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%.

T.7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pencapaian program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:



1. Persentase Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Pada tahun 2013, jumlah pejabat struktural di pemerintah kota Surabaya adalah sebanyak 1.629 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 1.371 orang atau 84,16%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 92,97%, maka capaian kinerjanya adalah 91,88%. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan terhadap pejabat struktural yang mengikuti diklat dikarenakan banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat tersebut telah mendekati Batas Usia Pensiun (BUP), dimana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bahwa pejabat yang dapat mengikuti diklat struktural maksimal 5 tahun sebelum memasuki BUP.

2. Persentase Penataan Jabatan Struktural

Pada tahun 2013, jumlah jabatan struktural di pemerintah kota Surabaya adalah sebanyak 1.907 jabatan. Dari jumlah tersebut, jabatan yang telah terisi sebanyak 1.629 orang atau 85,42%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 89,30%, maka capaian kinerjanya adalah 95,66%. Masih banyaknya jabatan struktural yang kosong disebabkan karena jumlah pegawai yang dipromosikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun khususnya pejabat struktural di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

T.8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pencapaian program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pemrosesan Produk Inti (*Core Business*) yang Memiliki Prosedur Tetap

Pada tahun 2013, terdapat pemrosesan produk inti sebanyak 12 produk inti, sehingga sampai dengan tahun 2013 dari 240 produk inti terdapat 101 pemrosesan produk inti atau sebesar 42.08%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39%, maka capaian kinerjanya adalah 107.91%.

2. Persentase SKPD yang Telah Melaksanakan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja

Indikator persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah



melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja dengan jumlah seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2012, dari 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota Surabaya selain Kelurahan, sebanyak 11 SKPD di lingkungan pemerintah kota Surabaya telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja. Pada tahun 2013, capaian ini meningkat menjadi sebesar 16 SKPD atau 22.22% dari 72 SKPD. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 21%, maka capaian kinerjanya adalah 105.81%.

**T.9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Pada tahun 2013, pemerintah kota Surabaya telah menerima 4.176 keluhan dari masyarakat melalui *media center*. Dari keseluruhan keluhan tersebut 100% telah selesai ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Adapun media komunikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan *media center* yaitu:

- Telepon : 031-5456290
- Toll Free : 0800 1404 122
- Fax : 031-5463435
- SMS : 0812 3025 7000
- Website : [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)
- Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
- Twitter : @SapawargaSby
- Email : [mediacenter@surabaya.go.id](mailto:mediacenter@surabaya.go.id)

**U. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN**

Pada tahun 2013, skor PPH kota Surabaya adalah sebesar 90.88 Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90,85, maka capaian kinerjanya adalah 100,03%.



## V. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini dimaksudkan untuk mencapai indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif, maksud dari indikator tersebut adalah keluarga miskin yang telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi untuk selanjutnya terfasilitasi melalui mitra usaha, sehingga keterampilan yang telah didapatkan keluarga miskin tersebut bisa direlisasikan untuk membuka usaha ekonomi yang produktif.

Pada tahun 2013, jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi atau telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 11.363 orang dari 14.872 orang atau 76,41%. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan yang telah melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 1.490 orang, yang terdiri dari bidang usaha handicraft, menjahit, makanan dan aneka produk rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.487 orang, maka capaian kinerjanya adalah 100,2%.

## X. URUSAN WAJIB KEARSIPAN

Pada tahun 2013, dari 232 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 155 SKPD atau 67% telah melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 67%, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

## Y. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa serta Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua program tersebut diuraikan sebagai berikut:

### Y.1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan kota Surabaya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang mengakses situs resmi milik pemerintah kota Surabaya yaitu



[www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id), yang berisikan informasi-informasi tentang kota Surabaya. Pada tahun 2013, rata-rata jumlah kunjungan pada setiap bulannya adalah sebanyak 364.618 kunjungan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 48.926 kunjungan, maka capaian kinerjanya adalah 745,24%.

#### Y.2. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan indikator:

##### 1. Layanan publik berbasis TIK

Sampai tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun 14 aplikasi layanan publik berbasis TIK. Untuk tahun 2013 jumlah layanan publik berbasis TIK yang terbangun sebanyak 5 aplikasi, sehingga jumlah total layanan publik berbasis TIK di pemerintah kota Surabaya sampai tahun 2013 sebanyak 19 layanan publik, jika dibandingkan dengan jumlah total layanan publik (108 layanan publik) maka persentasenya adalah 17,59%. Apabila dibandingkan dengan target persentase layanan publik yang berbasis TIK pada tahun 2013 adalah 13,89% (15 sistem) maka capaian kinerjanya adalah 126,64%.

##### 2. Pengguna Layanan Publik Berbasis Web

Jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya pada tahun 2013 sebanyak 8.651 orang, jika dibandingkan dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK sebanyak 32.282 orang maka persentasenya 26,80%. Apabila dibandingkan dengan target persentase pengguna layanan publik berbasis web pada tahun 2013 adalah 6% maka capaian kinerjanya adalah 446,67%.

#### Z. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

Pada tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan tercatat sebanyak 2.521.655 Orang. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 1.697.640 orang, maka capaian kinerjanya adalah 148,54%. Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan disebabkan oleh meningkatnya lokasi layanan baca





pada tahun 2013, antara lain Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di balai RW, kantor kecamatan, Puskesmas, perpustakaan percontohan sekolah serta Perpustakaan Umum Balai Budaya.

## **URUSAN PILIHAN**

### **A. URUSAN PILIHAN PERTANIAN**

Pada tahun 2013, jumlah sentra produk pertanian di Kota Surabaya sebanyak 26 Sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 26 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Sentra produk pertanian tersebut antara lain: Sentra Mangga di Kecamatan Pakal, Benowo, Lakarsantri, Sambikerep dan Bulak; Sentra Cabe di Kecamatan Sambikerep dan Lakarsantri; Sentra Semangka dan Garbis di Kecamatan Bulak; Sentra Sayuran semusim di Kecamatan Sambikerep; Sentra Jambu biji di Kecamatan Dukuh Pakis; Sentra Nangka di Kecamatan Bulak; Sentra Pepaya di Kecamatan Wiyung; Sentra Melon, Semangka dan Timun Mas di Kecamatan Sambikerep; Sentra Markisa di Kecamatan Mulyorejo dan Gunung Anyar, Sentra Belimbing Buah di Kecamatan Jambangan serta Sentra jamur di Sambikerep dan Rungkut.

### **B. URUSAN PILIHAN PARIWISATA**

Urusan Pilihan Pariwisata diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **B.1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Pencapaian program pengembangan pemasaran pariwisata diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

##### **1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara**

Keberhasilan pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata yang pertama diukur dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Surabaya. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebanyak 350.017 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 185.353 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 188,84%.



## 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2013, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Surabaya sebanyak 11.122.194 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 8.082.966 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 137,60%.

### B.2. Program Pengembangan Destinasi Wisata

Pencapaian program pengembangan destinasi pariwisata diukur berdasarkan indikator jumlah destinasi wisata yang terbentuk. Sampai dengan tahun 2013, obyek wisata Kota Surabaya yang ditingkatkan kualitasnya menjadi destinasi wisata sebanyak 16 lokasi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 16 lokasi, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

## C. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan diimplementasikan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Pencapaian kinerja program ini diukur berdasarkan jumlah kelurahan di kawasan pesisir yang diberdayakan. Pada tahun 2013, 13 kelurahan di kawasan pesisir telah diberdayakan, yaitu Kelurahan Kedung Cowek, Greges, Tambak Langon, Bulak Banteng, Wonorejo, Keputih, Gunung Anyar Tambak, Kenjeran, Medokan Ayu, Sukolilo, Tambak Wedi, Morokrembangan dan Kelurahan Romokalisari. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 13 kelurahan, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Pemberdayaan yang dilakukan diantaranya meliputi pelatihan bagi nelayan, pelatihan budidaya air tawar, bantuan sarana produksi budidaya ikan, pembuatan pakan dan pengolahan produk perikanan serta sarana penangkapan ikan.

## D. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Urusan Pilihan Perdagangan diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan serta Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

### D.1 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan



Pencapaian kinerja program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Jumlah Sentra Baru PKL

Keberhasilan pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan salah satunya diukur dari jumlah sentra baru Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibangun. Pada tahun 2013, jumlah sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 30 sentra. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 6 sentra dibandingkan tahun 2012, yaitu sebanyak 24 sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 120%.

2. Peningkatan Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Usaha

Indikator kinerja pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan yang kedua yaitu peningkatan jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha, yang dimaksud dengan memiliki daya saing usaha adalah sentra PKL telah memiliki kelembagaan dan standar pengelolaan usaha.

Pada tahun 2013, dari 31 sentra PKL yang terbangun, sebanyak 31 sentra telah memiliki daya saing usaha. Jumlah ini meningkat 5 sentra dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar 26 sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 31 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

D.2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dimaksudkan untuk pencapaian indikator persentase penyelesaian sengketa konsumen. Persentase tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan dengan jumlah sengketa konsumen yang dilaporkan. Pada tahun 2013 ada 88 laporan sengketa konsumen, dari jumlah tersebut 100% telah berhasil diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 84%, maka capaian kinerjanya adalah 119,05%.



## **D. TUGAS PEMBANTUAN**

### **D.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Nomor : DIPA-032.07.4.059104/2013 tanggal 5 Desember 2012. Selain DIPA, alokasi dana juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2012 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.

Pelaksana Tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, dengan sasaran kelompok petambak garam rakyat. Kegiatan tersebut meliputi komponen Pengembangan Usaha Ekonomi (pemberian Bantuan Langsung Masyarakat/BLM bagi kelompok sasaran kegiatan), Sosialisasi Program, Pendampingan Masyarakat, Review Pelaksanaan PUGAR 2013 serta Monitoring dan Evaluasi. Pedoman pelaksanaan kegiatan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut pedoman teknis diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04A/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Tahun 2013. Adapun penerima manfaat program adalah 47 kelompok usaha garam (KUGAR) atau 388 orang petambak garam dan 11 Gabungan KUGAR (Bung KUGAR) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Pakal, Benowo, Asemrowo dan Tandes.

### **D.2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN**

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan



Perikanan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-032.06.4.059160/2013 Tanggal 5 Desember 2012. Selain DIPA, alokasi dana juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2012 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.

Pelaksana Tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan melalui empat kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Fasilitas Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi serta Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu Sentra Ikan Bulak dan Pasar Ikan Hias Gunungsari.

### D.3. PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-024.03.4.059664/2013 tanggal 5 Desember 2012. Selain DIPA, alokasi untuk Program tersebut juga termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71/MENKES/SK/II/2013 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2013.

Pelaksana Tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan melalui pembagian alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kegiatan yang difokuskan untuk pencapaian MDG's Bidang Kesehatan melalui berbagai kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di 62 Puskesmas di Kota Surabaya. Petunjuk teknis pelaksanaan BOK tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.



## E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### E.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama antar daerah dengan beberapa kota di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri mitra kerjasama Kota Surabaya yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sampai dengan akhir tahun 2013 adalah:

No.	Kab/ Kota Mitra Kerjasama	Dasar Pelaksanaan	Tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama
1.	Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Bersama Nomor : <u>415.4/4167/436.2.3/2009</u> 120.1/84/012/2009 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah	1 September 2009
		Perjanjian Kerjasama Nomor: <u>181.4/ 2063/ 013/ 2013</u> 180/ 4617/ 436.1.2/ 2013 tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum kepada Kota Surabaya	31 Juli 2013
		Perjanjian Kerjasama Nomor: <u>120.1/ 56/ 012/ 2013</u> 440/ 3483/ 436.6.3/ 2013 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	27 Mei 2013
2.	Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum Purabaya di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo	13 Agustus 1998
3.	Kota Bandung (Jawa Barat)	Kesepakatan Bersama Nomor : <u>130/4733/436.2.3/2012</u> 119/1916-Pem.Um/2012	31 Agustus 2012



No.	Kab/ Kota Mitra Kerjasama	Dasar Pelaksanaan	Tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama
		Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	
4.	Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	Kesepakatan Bersama Nomor : <u>415.4/742/436.2.3/2012</u> 183.1/02/KUM/2012 Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	15 Pebruari 2012
5.	Kota Yogyakarta (D.I Yogyakarta)	Kesepakatan Bersama Nomor : <u>415.4/3012/436.1.4/2008</u> 08/NKB/2008 Tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	6 Juli 2008
6.	Kota Padang (Sumatera Barat)	Kesepakatan Bersama Nomor : <u>415.4/3575/436.2.3/2009</u> 183.8/HK-PDG/2009 Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	29 Juli 2009
7.	Kabupaten Gresik (Jawa Timur)	Kesepakatan Bersama Nomor : <u>415.4/3574/436.2.3/2009</u> 180/43/437.12/2009 Tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan Bertetangga	29 Juli 2009
8.	Kota Denpasar (Bali)	Kesepakatan Bersama Nomor : <u>415.4/6343/436.2.3/2011</u> 415.4/19/KB/PEM/2011 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	15 Desember 2011

Sementara, ada pula beberapa daerah lain yang masih dalam tahap peninjauan antara lain Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Medan, Kota Palopo dan Kabupaten Bantul.



Selain dengan kota - kota dalam negeri, Kota Surabaya juga telah memiliki beberapa mitra kerjasama antar daerah di luar negeri, diantaranya :

No.	Mitra	Dasar Pelaksanaan	Waktu Penandatanganan
1.	Kota Seattle (AS)	MoU Kerjasama Sistercity	1992
2.	Kota Busan (Korsel)	MoU Kerjasama Sistercity	10 Nopember 1994
3.	Kota Kochi (Jepang)	MoU Kerjasama Sistercity	17 April 1997
4.	Kota Guangzhou (RRC)	MoU Kerjasama Sistercity	21 Desember 2005 (diperpanjang tahun 2010)
5.	Kota Xiamen (RRC)	MoU Kerjasama Sistercity	23 Juni 2006
6.	Kota Varna (Bulgaria)	MoU Kerjasama Sistercity	1 Desember 2010
7.	Kota Monterrey (Meksiko)	MoU Kerjasama Sistercity	2001
8.	Kota Kitakyushu (Jepang)	MoU Kerjasama Sistercity	12 Nopember 2012
9.	Kota Shah Alam (Malaysia)	Lol Kerjasama Sistercity	21 Mei 2009
10.	Kota Marseille (Perancis)	Lol Kerjasama Sistercity	15 Februari 2007
11.	Kota Jiangmen (RRC)	Lol Kerjasama Sistercity	31 Mei 1012

## E.2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

### 1. Mitra Kerjasama dan Bidang Kerjasama

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Surabaya





juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2013 antara lain :

No.	Mitra Kerjasama	Ruang Lingkup/ Bentuk Kerjasama	Keterangan
1.	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	pendidikan ketrampilan; pengembangan energi terbarukan; teknologi tepat guna; dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 1 Desember 2012
2.	Universitas Airlangga Surabaya	kesehatan; ekonomi; sosial politik; hukum; perikanan dan kehewanian; farmasi; seni budaya dan pariwisata; dan bidang - bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.	Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga Surabaya 23 Juni 2012
3.	Universitas Negeri Surabaya	pendidikan dan pelatihan; seni budaya dan pariwisata; teknologi tepat guna; kepemudaan dan olahraga; kependudukan dan lingkungan hidup; boga dan busana; pengembangan wilayah; bidang - bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.	Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Negeri Surabaya 23 Juni 2012
4.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	sistem transportasi kota; M/GIS based tata ruang; pengelolaan air bersih; manajemen limbah; teknologi informasi dan komunikasi; lingkungan hidup; teknologi tepat guna; bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.	Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 23 Juni 2012
5.	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	kehidupan beragama; pendidikan agama; bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak	Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



No.	Mitra Kerjasama	Ruang Lingkup/ Bentuk Kerjasama	Keterangan
			Surabaya 23 Juni 2012
6.	KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); Pariwisata; Seni dan Budaya, khususnya Seni Tari dan Karawitan; Penanggulangan narkoba; dan bidang - bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.	Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan KOPERTIS Wilayah VII 23 Juni 2012
7.	Universitas Indonesia	a. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan : - penyusunan kebijakan pengembangan sistem angkutan masal cepat; - penyusunan dokumen rencana umum pelaksanaan pengembangan sistem angkutan masal cepat; b. Pendampingan dan review dalam pelaksanaan pemilihan badan usaha pengembangan sistem angkutan massal cepat; Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Indonesia Tentang Pengembangan Sistem Angkutan Masal Cepat Di Kota Surabaya Mei 2013 s/d Mei 2014
8.	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	a. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan : - penyusunan kebijakan pengembangan system angkutan massal cepat; - perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem angkutan massal cepat; - pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam pengembangan sistem angkutan massal cepat; b. Pembentukan tim teknis dalam rangka implementasi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Gadjah Mada Mei 2013 s/d Mei 2014



No.	Mitra Kerjasama	Ruang Lingkup/ Bentuk Kerjasama	Keterangan
		pengembangan sistem transportasi massal di Kota Surabaya; dan Kegiatan lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak	
9.	Universitas Brawijaya Malang	a. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan : - penyusunan kebijakan pengembangan sistem angkutan masal cepat; - perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem angkutan masal cepat; - pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam pengembangan sistem angkutan massal cepat; b. Pembentukan tim teknis dalam rangka implementasi pengembangan sistem transportasi massal di Kota Surabaya; Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Brawijaya Mei 2013 s/d Mei 2014

### E.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

### E.4. Pembinaan Batas Wilayah

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang diturunkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka dalam rangka kewenangan daerah untuk pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang ada diwilayahnya, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan menetapkan kejelasan batas wilayah administrasi.

Pada tahun 2013 fokus pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya adalah pada pembinaan batas wilayah administrasi dalam wilayah Kecamatan dan Kelurahan dan pelaksanaan Penegasan batas wilayah Kota. Kegiatan yang dilaksanakan untuk itu adalah kegiatan Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sejumlah 260 patok batas yang dilaksanakan pada 36 kelurahan dan 10 kecamatan dan melakukan Monitoring Batas Wilayah antar kelurahan di Kota Surabaya.

Hasil pelaksanaan monitoring terhadap 100 titik patok batas yang telah terpasang diketahui, terdapat 93 patok batas yang hilang terkena pendangkalan sungai, tertutup alang-alang, tertutup gundukan tanah, perbaikan dam karet, pelebaran sungai, tertutup jalur double track kereta api, 5 patok batas masih ada tetapi kondisinya rusak (plaque dan brasstabletnya hilang), dan hanya ada 2 patok batas yang konsisinya baik.

Indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan dan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program penataan daerah otonom adalah persentase penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, yang pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 37%.

#### **E.5. Pencegahan Penanggulangan Bencana**

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/107/436.1.2/2012 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Satlak PB yang diketuai oleh Walikota Surabaya, dengan Ketua Pelaksana Harian Wakil Walikota Surabaya mempunyai tugas untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat terhadap bencana sehingga korban dan penderitanya dapat dibatasi dan diminimalkan.

Satlak PB Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan



penanggulangan bencana dan pengungsi di Surabaya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Timur, yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat kejadian dan setelah terjadinya bencana yang dimulai dengan mitigasi, kesiap siagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

#### **E.6. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Pemerintah Kota Surabaya tidak mengelola kawasan khusus sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sesuai penjelasan Pasal 9 Ayat (1) yaitu kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri dan sebagainya.

#### **E.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat kami sampaikan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Operasi Yustisi KTP dan PSK bekerja sama dengan Dinsos dan Bapemas KB sebanyak 4.356 obyek
- b. Penertiban PKL di Kota Surabaya sebanyak 44.139 obyek yaitu :  
Jl. Basuki Rachmad , Jl. Panglima Sudirman , Jl. Blauran , Jl. Pahlawan , Jl. Pegirian , Jl. Diponegoro , Jl. Arjuno , Jl. Embong Malang , Jl. Kedungdoro , Jl. Pasar Kembang dll
- c. Pengamanan ( PAM ) di Taman – taman Kota yaitu :  
Taman Bungkul , Taman Mundu , Taman Pelangi , Taman Lansia , Taman Persahabatan , Taman Ekpresi , Taman Prestasi dll
- d. Pengawasan dan penertiban RHU di seluruh Kota Surabaya sebanyak 417 obyek
- e. Pengawasan dan Penertiban IMB sebanyak 449 obyek , HO sebanyak 285 obyek
- f. Pengawasan dan Penertiban Pakir umum sebanyak 239 obyek



- g. Pengawasan dan Penertiban Kebersihan sebanyak 187obyek
- h. Pengawasan dan Penertiban Perda Lain sebanyak 304 obyek
- i. Penertiban Anjal/Gepeng di perempatan jalan/lampu merah sebanyak 1.516 orang
- j. Penertiban Bangunan Liar di sepanjang jalan dan ditepi sungai Kalimas Kota Surabaya sebanyak 456 obyek
- k. Penertiban Reklame baik tetap maupun insidental diseluruh wilayah Kota Surabaya sebanyak 16.925 obyek

## F. PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Tantangan terbesar Kota Surabaya adalah menyiapkan Kota Surabaya agar tidak termarginalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Surabaya **“Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, Dan Berwawasan Lingkungan”**

Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba memenuhi komitmen moral, bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Pada akhirnya, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2013 ini sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah.



Atas segala perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur terhadap Pembangunan dan kemajuan Kota Surabaya disampaikan ucapan terima kasih.

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**